



### HARI PERTAMA SEKOLAH DI SLB CAHAYA QURAN BOGOR

Sejumlah siswa SLB A Tuna Netra belajar membaca Al Quran Braille di SLB Cahaya Quran, Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (27/3). Yayasan Tabungan Surga menyelenggarakan SLB Cahaya Quran dengan memberikan pendidikan gratis untuk siswa tuna netra, tuna rungu dan tuna grahita melalui kegiatan pesantren kilat di hari pertama masuk sekolah saat bulan Ramadhan 1444 H.

## Pemkot Tangerang Gelar Pangan Murah di Permukiman Warga

Di setiap kecamatan, kegiatan Gelar Pangan Murah akan berlangsung selama dua hari mulai pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB. "Kami harap masyarakat bisa datang ke lokasi GPM untuk mendapatkan pangan dengan harga murah," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, Muhdoron.

**TANGERANG (IM)** - Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) bekerjasama dengan tujuh vendor akan menghadirkan Gelar Pangan Murah (GPM) di 13 kecamatan yang berlangsung di permukiman warga dalam mengantisipasi kenaikan harga pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, Muhdoron di Tangerang, Senin (27/3), mengatakan Gelar Pangan Murah akan berlangsung di permukiman yang lebih mendekati ke masyarakat, bukan di kantor kelurahan atau kecamatan setempat.

Adapun tujuh vendor yang terlibat dalam kegiatan

tersebut diantaranya Bulog, Paskomnas, Golden Mom, Berkat Mandiri Prima, Polaksar Loligo, Mina Food Nusantara, dan PT Anugrah Citra Boga.

"Pangan yang akan diujakan di antaranya, beras, minyak goreng, tepung, gula, cabai, bawang, kentang, wortel, telur, daging, seafood frozen, olahan daging frozen dan lainnya. Dipastikan produk yang ditawarkan dibandrol lebih murah dibanding harga pasaran," kata Muhdoron dalam keterangannya.

Di setiap kecamatan, kegiatan GPM akan berlangsung selama dua hari mulai pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB.

"Kami harap masyarakat bisa datang ke lokasi GPM untuk

mendapatkan pangan dengan harga murah," ujarnya.

Adapun jadwal GPM di setiap kecamatan adalah Kecamatan Larangan tanggal 27 sampai 28 Maret 2023 berlokasi di halaman Masjid Jami' Riyadh Shalihon Cipadu Jaya.

Di Kecamatan Ciledug tanggal 27 sampai 28 Maret di Halaman Masjid Al Akhyar, Kelurahan Sudimara Barat. Lalu Kecamatan Karang Tengah tanggal 27 sampai 28 Maret di Halaman Masjid Nurul Amin, Kelurahan Pondok Pupung.

Kecamatan Benda tanggal 29 sampai 30 Maret di

Halaman Masjid At Taqwa Kelurahan Belendung. Kecamatan Batuaceper tanggal 29 sampai 30 Maret di Halaman Masjid Darussalam, Kelurahan Batusari.

Kecamatan Neglasari tanggal 3 sampai 4 April di Halaman Masjid Jamie Nurul Ikhlas, Kelurahan Kedaung Baru. Kecamatan Tangerang tanggal 3 sampai 4 April di Halaman Masjid Al Inayah Kelurahan Gikokol atau Masjid Al Muhajirin Kelurahan Tanah Tinggi.

Kecamatan Cibodas tanggal 5 sampai 6 April di Halaman Masjid Nurul Amin, Kelurahan Cibodas. Kecamatan

Jatiuwung tanggal 5 sampai 6 April di Halaman Masjid Urwatul Wutsqo Kelurahan Gandasari. Kecamatan Peruk tanggal 10 sampai 11 April. Kecamatan Karawaci tanggal 10 sampai 11 April di Halaman Masjid Arrahman Kelurahan Cimone.

Kecamatan Pinang tanggal 12 sampai 13 April di Halaman Masjid Al Mutaqin Kelurahan Panunggan Utara.

Kecamatan Cipondoh tanggal 12 sampai 13 April di Halaman Masjid Al Muhajirin Komplek Buana Permai. ● pp

### PELINDO CIWANDAN BUAT PEMOTOR

## Skema Arus Mudik Lebaran Tahun Ini, Merak Hanya untuk Mobil Pribadi dan Bus

**SERANG (IM)** - Pemerintah menyiapkan skema mudik lebaran tahun ini di pelabuhan penyeberangan Merak agar bisa berjalan dengan lancar. Salah satu skema yang disiapkan adalah Pelabuhan Merak khusus melayani pemudik yang menggunakan mobil pribadi dan bus.

Sedangkan pemudik yang menggunakan sepeda motor akan dialihkan ke Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Ciwandan. Pemudik yang akan menggunakan sepeda motor dari arah Jakarta akan dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan melalui Jalan Lingkar Selatan (JLS).

Dengan skema ini, diharapkan kepadatan pemudik yang biasa terjadi di jalur menuju Pelabuhan Merak akan terpecah.

Skema itu dipersiapkan pemerintah lantaran diperkirakan jumlah pemudik akan mengalami lonjakan signifikan di tahun ini. Dan mayoritas menuju sejumlah daerah di Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyebut jika kemENTERIannya memprediksi terjadi peningkatan jumlah pemudik secara nasional di tahun ini dari tahun sebelumnya. Dijelaskan Budi, jumlah pemudik tahun ini diperkirakan mencapai 123 juta orang. Sedangkan di tahun lalu hanya 85 juta orang.

"Kita harus tahu bahwa setiap pelaksanaan mudik, Kementerian Perhubungan itu melakukan research, dari research yang kita lakukan, jumlah pemudik yang sekarang ini naik signifikan, dari 85 juta menjadi 123jt, sangat tinggi," ujar Budi.

Dari 123 juta itu didominasi oleh angkutan darat, roda empat dan roda dua. Atas dasar itu kementerian terus berkoordinasi dengan gubernur, korlantas, dan beberapa Dirut Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menyikapi lonjakan pemudik itu, selain Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan juga akan digunakan untuk tempat kapal roll on roll of (Ro-Ro) sandar dan mengangkut penumpang.

Di Pelabuhan Merak sebanyak 65 unit kapal akan beroperasi untuk mengangkut penumpang. Sedangkan di Pelabuhan Ciwandan akan dioperasikan sebanyak 15 unit kapal.

Menhub Budi sendiri mengimbau masyarakat untuk tidak mudik dengan sepeda motor. Menhub Budi mengimbau agar masyarakat tidak membawa sepeda motor saat mudik karena rawan menyebabkan kecelakaan.

"Sepeda motor, dengan segala kerendahan hati, kami mengimbau kepada saudaraku tidak menggunakan motor untuk mudik, karena menggunakan motor, berbanding lurus dengan tingkat kecelakaan yang ada," papar Menhub Budi.

Kemenhub akan memberikan solusi bagi masyarakat yang tidak mudik menggunakan sepeda motor yaitu menyiapkan banyak bus, kereta, dan kapal gratis. "Saya anjurkan juga mudik itu lebih nyaman," tuturnya.

Sementara itu, PT ASDP Indonesia Ferry kembali mengingatkan calon pemudik untuk membeli tiket kapal roll on roll of (roro) atau ferry dari sekarang. Calon pemudik diminta segera melakukan reservasi tiket penyeberangan via Ferizy demi kelancaran, kenyamanan dan keselamatan selama perjalanan. ● pra



### LAYANAN PENUKARAN UANG DI BANTEN

Sejumlah warga antri menunggu giliran untuk menukarkan uang di mobil layanan kas keliling di Alun-alun Kota Serang, Banten, Senin (27/3). Bank Indonesia bekerja sama dengan perbankan nasional dalam menggelar layanan kas keliling penukaran uang pecahan untuk memudahkan warga mendapat uang pecahan baru.

## Wali Kota Tangsel Minta Anggaran Bukber Pejabat Disumbang ke Yatim

**TANGSEL (IM)** - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie meminta pejabat dan pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel untuk mentaati aturan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo, terkait larangan buka bersama (bukber).

Menurut Benyamin, jika agenda bukber telah dibuat dan telah dianggarkan sebelumnya, ia meminta para pejabat untuk menyumbangkan dana tersebut ke yatim piatu.

"Lebih baik buat santunan yatim, salurkan melalui Baznas, melalui rumah-rumah yatim," ujar Benyamin di gedung DPRD Kota Tangsel, Serpong, Senin (27/3).

Benyamin juga menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk tidak membuat anggaran bukber setelah aturan dibuat, hanya untuk mengakali anggaran agar dipergunakan tidak sebagaimana mestinya.

"Kalau tidak ada alokasi anggaran untuk bukber, jangan mengada-ada juga," ujarnya.

Benyamin melanjutkan, aturan larangan bukber bagi pejabat sebetulnya fleksibel. Ia masih memberi izin jika undangan bukber datang dari masyarakat untuk pejabat Pemkot Tangsel.

"Kalau diundang warga, tidak masalah. Yang tidak boleh antara pejabat dan stafnya di rumah makan," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melalui surat Sekretaris Kabinet Indonesia No. 38/Seskab/DKK/03/2023 yang ditandatangani Seskab Pramono Anung, melarang kegiatan bukber antara pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia.

Ada dua poin utama dalam surat larangan ini sehingga kegiatan bukber dilarang bagi pejabat negara diantaranya, penanganan Covid-19 dalam transisi, sehingga diperlukan kehati-hatian dan menghindari gaya hedon pejabat yang tengah mendapat sorotan publik. ● pp

## Turap Kali Bocor, Warga Perumahan PBI Ciputat Waswas Banjir Susulan

**TANGSEL (IM)** - Warga Perumahan Puri Bintaro Indah (PBI) Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), khawatir dengan banjir susulan yang akan melanda permukiman mereka.

Pasalnya, turap yang baru dibangun di sisi perumahan bocor.

Pantau di lokasi, Senin (27/3) pukul 11.00 WIB, hujan deras kembali menguyur wilayah tersebut.

Warga sekitar pun mulai bersiap mengantisipasi jika hujan deras berlangsung lama, hingga memicu banjir sebagaimana terjadi Minggu (26/3) malam.

Air dari aliran kali di sisi Perumahan PBI masuk ke jalan perumahan akibat adanya pangkal dinding turap yang bocor.

"Ada kebocoran di belakang, pas tikungan, cukup deras juga itu kebocorannya. Baru itu titik bocor yang terpantau," ungkap Ketua RT setempat, Darmanto ditemui di lokasi.

Perumahan PBI kerap

dilanda banjir jika hujan deras. Warga sebenarnya sempat merasa lega dengan peresmian pembangunan turap Kali PBI pada 2 Maret 2023 lalu.

Turap itu dibangun sepanjang 340 meter di sisi kanan dan 450 meter di sisi kiri kali. Dinding turap kali PBI dibuat meninggi sekira 2 meter hingga mampu membendung luapan permukaan kali saat hujan deras turun.

Namun kemarin sore, air dari kali masuk melalui bocoran pada turap.

Selain itu, penyebab lain adalah drainase yang tak berfungsi dengan baik akibat tersumbat sampah.

Warga berharap, kebobrokan turap Kali PBI segera diperbaiki guna mencegah luapan air kali masuk ke perumahan.

"Semoga cepat bisa diperbaiki, takutnya yang bocor makin besar dan melebar. Apalagi cuaca mendung terus seperti ini, kita jadi merasa waswas belum tuntas diperbaiki," ucap Sugeng, warga perumahan. ● pp

## DPRD Pandeglang dan Aktivist Soroti Kerusakan Jalan Pasirkadu

**PANDEGLANG (IM)** - Adanya akses jalan kabupaten di Desa Pasirkadu, Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang yang rusak akibat sering dilintasi kendaraan sumbu tiga dari proyek jalan tol Serang-Panimbang, mendapat kritikan pedas dari DPRD Pandeglang dan aktivis.

Kedua lembaga tersebut juga mendesak, agar pihak perusahaan bertanggung jawab atas dampak buruk dari aktivitas kendaraan proyek, dan Pemkab Pandeglang juga jangan tinggal diam atas adanya persoalan tersebut.

Sebab, meski proyek jalan tol itu untuk kepentingan masyarakat, tapi jika menimbulkan kerusakan terhadap akses jalan lain maka harus ada pertanggungjawaban.

Menurut sekretaris Komisi III DPRD Pandeglang, Ade Muamar, bahwa pihak pengelola proyek jalan tol yang menggunakan kendaraan sumbu tiga yang menggunakan akses jalan kabupaten di Desa Pasirkadu, harus bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang ditimbulkan oleh aktivitas kendaraan over tonase tersebut.

"Akses jalan yang dilintasi kendaraan proyek tol itu hanya ruas jalan Pasirkadu, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan," ungkapnya, Senin (27/3).

Dikatakannya, ada aturan dan penyesuaian kapasitas antara ruas jalan dengan kendaraan. Seperti jalan K1 tidak layak dilalui kendaraan sumbu tiga yang bermuatan tinggi.

Sehingga beban berat kendaraan dengan jalan tidak sesuai.

"Tapi, jika tidak ada akses lain dan kegiatan pembangunan harus tetap jalan. Maka harus ada persetujuan

bersama pihak-pihak terkait dan harus ada kompensasi dari pihak pengelola proyek. Artinya bertanggungjawab atas kerusakan akses jalan itu," katanya.

"Tapi jika masih ada jalan alternatif lain yang sesuai kapasitas kendaraan sumbu tiga, lebih baik ambil jalur lain. Jangan sampai proses pembangunan lain menimbulkan dampak buruk terhadap fasilitas umum yang ada," ujarnya.

Politisi PKB itu juga menyarankan, muatan yang diangkut oleh kendaraan sumbu tiga tersebut juga harus diantisipasi jalan sampai berceceran di jalan raya, karena dapat mengganggu dan merugikan orang lain juga.

"Minimal ditutup dengan terpal, supaya barang yang dibawa kendaraan itu tidak tumpah dan berceceran ke jalan," sarannya.

Terpisah, salah seorang aktivis Pandeglang, Torik Azis meminta, Pemkab Pandeglang atau dinas terkait harusnya jangan diam terkait adanya keluhan masyarakat, kaitan dengan adanya akses jalan yang rusak oleh aktivitas kendaraan sumbu tiga dari proyek jalan tol tersebut.

Karena menurutnya, meski pembangunan tersebut untuk kepentingan masyarakat, namun jika berdampak buruk terhadap sarana umum lain seperti akses jalan raya, maka pihak-pihak terkait harus bertanggung jawab.

"Seperti DPUPR dan Dis-hub Pandeglang jangan diam dan jangan tutup mata. Harus turun tangan bagaimana pertanggungjawaban pihak perusahaan terhadap kondisi jalan kabupaten yang rusak akibat aktivitas kendaraan sumbu tiga itu," tuturnya. ● pra